

KEBIJAKAN DAUR ULANG SAMPAH OLEH PRODUSEN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDUNG

Dicky Dwianto

E1A014017

ABSTRAK

Produsen/Badan Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggungjawab secara moral terhadap apa yang mereka produksi termasuk tanggungjawab terhadap dampak lingkungan. Hal ini sesuai tanggungjawab Produsen/Badan Usaha dipertegas dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandung yang salah satu pasalnya mengatur bagaimana Produsen/Badan Usaha mengelola apa yang sudah mereka produksi. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Produsen/Badan usaha di Kota Bandung terkait Peraturan Daerah Kota Bandung Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandung, mengingat volume sampah dan masyarakat di Kota Bandung semakin tahun makin meningkat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui data-data sekunder dan primer yang terkumpul untuk kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk teks naratif serta dianalisis dengan metode normatif .

Dari hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan daur ulang sampah oleh Produsen/Badan Usaha dalam mengelola sampah di Kota Bandung masih belum optimal, beberapa faktornya karena kurangnya pemahaman Produsen/Badan Usaha di Kota Bandung tentang penggunaan bahan produksi, masih banyak Produsen/Badan Usaha yang menggunakan bahan produksi yang tidak ramah lingkungan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya membuang dan mengelola sampah membuat masalah sampah di Kota Bandung semakin sulit diselesaikan karena permasalahan sampah terjadi ketika perilaku masyarakat hanya fokus pada menikmati setiap produk yang dihasilkan Produsen/Badan Usaha tanpa mengimbanginya dengan mengelola kembali sampah dari produk – produk yang dinikmati. Fenomena yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana kebijakan daur ulang sampah oleh Produsen/Badan Usaha selaku ‘hulu’ dari setiap sampah yang dihasilkan melalui produk yang dikonsumsi masyarakat dan faktor apa yang menjadi penghambat Produsen/Badan Usaha dalam melaksanakan kebijakan daur ulang sampah tersebut. Pemerintah Kota Bandung berupaya meminimalisir permasalahan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah dimana struktur birokrasi dalam peraturan tersebut sudah terkoordinir dengan baik namun dalam pelaksanaannya memiliki beberapa hambatan yakni sanksi bagi Produsen/Badan Usaha yang melanggar aturan masih kurang tegas dan adanya aparat yang menjalankan tupoksi tidak sesuai dengan SOP.

Kata Kunci : Kebijakan, Produsen, Kota Bandung.

KEBIJAKAN DAUR ULANG SAMPAH OLEH PRODUSEN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDUNG

Dicky Dwianto

E1A014017

ABSTRACT

Producers / Business Entities are directly or indirectly morally responsibility for environmental impacts. This is in accordance with the responsibility of the Producer / Business Entity to be confirmed by the existence of Regional Regulation No. 9 of 2018 concerning Waste Management in the City of Bandung, whivh one of the article regulates how Producers / Business Entities manage what they have produced. This study aimed to determine the Producers / Business Entities in the City of Bandung related to the Regional Regulation of the City of Bandung Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning Waste Management in the City of Bandung, given the volume of waste and the community in then City of Bandung is increasing. This study uses normative juridical methods through secondary data collected to be processed and the presented in the form of narrative texts and analyzed with normative methods.

Form the result of the study, the implementation of waste recycling policy by Producers / Business Entities in managing waste in the City of Bandung is still not optimal, some factors are due to the lack of understanding of Producers / Business Entities in the City of Bandung regarding the use of production materials, there are still many Producers / Business Entities that use materials production that is not environmentally friendly, the lack of public understanding of the importance of disposing and managing waste make the problem of waste in the City of Bandung even more difficult to solve because the problem of waste occurs when people's behavior is only focused on enjoying every product produced by Producers / Business Entities without compensating it by managing waste form products enjoyed. An interesting phenomenon to study is how the waste recycling policy by Producers / Business Entities as upstream of each waste produced through products consumed by the public and what factors are inhibiting Producers / Business Entities in implementing the waste recycling policy. The Bandung City Government seeks to minimize this problem by insuuing Bandung City Regulation number 9 of 2018 regarding waste management where the bureaucratic structure in the regulation has been properly codified but in its implementation it has several obstacles namely sanctions for Producers / Business Entities who violate the rules are still less strict and the apparatus running the tupoksi is not in accordance with the SOP.

Keywords : *Implementantion, Producer/Business entities, Bandung City.*